

# MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

# PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

#### NOMOR 5 TAHUN 2012

#### **TENTANG**

#### JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA KREDITNYA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas analisis kebijakan publik pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya;

#### Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108):

J

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332):
- Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; dan
- 12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011.

#### Memperhatikan

- : 1. Usul Sekretaris Kementerian PAN dan RB Nomor B/87/S.PAN-RB/1/2012 tanggal 10 Januari 2012;
  - Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor WK.26-30/V.33-6-93 tanggal 30 Januari 2012;

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA KREDITNYA

#### BABI

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

 Jabatan fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan analisis kebijakan yang mencakup proses identifikasi masalah kebijakan, formulasi kebijakan, penyampaian hasil analisis kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan oleh Pegawai Negeri Sipil.

- Analis Kebijakan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan tugas mengidentifikasi masalah kebijakan, memformulasi kebijakan, menyampaikan hasil analisis kebijakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kebijakan pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Analis Kebijakan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Analis Kebijakan.
- Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Analis Kebijakan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
- 5. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.
- Penghargaan adalah tanda jasa, tanda kehormatan atau bentuk penghargaan lain yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasional/regional/ internasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah.
- Pejabat penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon V atau pejabat lain yang ditentukan.

#### BAB II

# RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

#### Pasal 2

Jabatan fungsional Analis Kebijakan termasuk dalam rumpun manajemen.

- (1) Analis Kebijakan merupakan pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kebijakan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
- (2) Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

1

Tugas Pokok Analis Kebijakan adalah mengidentifikasi masalah kebijakan, memformulasi kebijakan, menyampaikan hasil analisis kebijakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kebijakan pada kementerian/lembaga Pemerintah Non Kementerian dan pemerintah daerah.

#### BAB III

# INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

#### Pasal 5

Instansi Pembina jabatan fungsional Analis Kebijakan yakni Lembaga Administrasi Negara.

#### Pasal 6

Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus:

- a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Analis Kebijakan;
- b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Analis Kebijakan;
- c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Analis Kebijakan;
- d. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Analis Kebijakan;
- e. mensosialisasikan jabatan fungsional Analis Kebijakan;
- f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Analis Kebijakan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Analis Kebijakan;
- h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Analis Kebijakan;
- i. memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Analis Kebijakan;
- j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Analis Kebijakan;
- k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Analis Kebijakan;
- I. melakukan pembinaan Tim Penilai jabatan fungsional Analis Kebijakan; dan
- m. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Analis Kebijakan.

#### **BAB IV**

# JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

#### Pasal 7

- (1) Jenjang jabatan fungsional Analis Kebijakan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
  - a. Analis Kebijakan Pertama;
  - b. Analis Kebijakan Muda;
  - c. Analis Kebijakan Madya; dan
  - d. Analis Kebijakan Utama.
- (2) Jenjang pangkat Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
  - a. Analis Kebijakan Pertama:

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

- b. Analis Kebijakan Muda:
  - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
  - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Analis Kebijakan Madya:
  - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
  - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Analis Kebijakan Utama:
  - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
  - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (3) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
- (4) Penetapan jenjang jabatan Analis Kebijakan untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (5) Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### **BABV**

# UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

#### Pasal 8

Unsur dan sub unsur kegiatan Analis Kebijakan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

- 1. Pendidikan, meliputi:
  - a. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
  - b. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Analis Kebijakan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan Prajabatan.
- 2. Analisis Kebijakan, meliputi:
  - a. perencanaan kegiatan;
  - b. identifikasi masalah;
  - c. formulasi kebijakan;
  - d. proses penetapan hasil analisis;
  - e. implementasi/pelaksanaan kebijakan; dan
  - f. evaluasi kinerja kebijakan.
- 3. Pengembangan profesi, meliputi:
  - a. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang analisis kebijakan;
  - b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang analisis kebijakan;
  - c. pengembangan sistem analisis kebijakan;
  - d. pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang analisis kebijakan; dan
  - e. kegiatan pengembangan diri di bidang analisis kebijakan.
- 4. Penunjang kegiatan Analis Kebijakan, meliputi:
  - a. pengajar/pelatih di bidang Analis Kebijakan;
  - b. peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang Analis Kebijakan;
  - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
  - d. keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Analis Kebijakan;
  - e. perolehan penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau penghargaan lainnya;
  - f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
  - g. perolehan gelar kehormatan akademis.

#### BAB VI

### RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

- (1) Rincian kegiatan Analis Kebijakan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
  - a. Analis Kebijakan Pertama, meliputi:
    - Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta/anggota;
    - Mengumpulkan (mengenali dan mencari) issue-issue kebijakan yang bersifat internal (instansional);
    - Mengumpulkan (mengenali dan mencari) issue-issue kebijakan yang bersifat regional/wilayah/daerah;
    - 4. Mengidentifikasi masalah untuk menemukan masalah substantif (strukturisasi masalah);
    - 5. Mengindentifikasi kebijakan yang akan dilakukan yang relevan dengan issue kebijakan;
    - 6. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan.
    - Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih untuk menganalisis kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
    - Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan, secara berkelompok sebagai Peserta/Anggota;
    - 9. Membahas konsep kebijakan sebagai peserta/anggota;
    - 10. Menyusun draft rencana kegiatan (action plan) dalam pelaksanaan kebijakan;
    - 11. Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota;
    - 12. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada;
  - Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
  - 14. Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;

- 15. Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
- 16. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota;
- Menyusun kebijakan/peraturan pemerintah sebagai peserta/anggota;
- 18. Menjadi saksi ahli.

# b. Analis Kebijakan Muda, meliputi:

- Menyusun rencana kerja organisasi sebagai peserta/anggota;
- Mengumpulkan (mengenali dan mencari) issue-issue kebijakan yang bersifat nasional;
- Memverifikasi dan menspesifikasi masalah untuk menentukan agenda kebijakan (masalah formal);
- 4. Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan, yang bersifat sederhana (instansional);
- 5. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan;
- Menyusun dan menetapkan metodologi untuk melakukan analisis kebijakan (sesuai dengan kebutuhan), yang bersifat sederhana (1-2 metode);
- Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih untuk menganalisis kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
- Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan, secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
- 9. Menganalisis permasalahan kebijakan;
- 10. Menyusun alternatif kebijakan sebagai solusi masalah kebijakan;
- Menyusun konsep kebijakan (draft) yang bersifat beschiking (penetapan);
- 12. Membahas konsep kebijakan sebagai peserta/anggota;
- 13. Menyiapkan bahan-bahan untuk sosialisasi pelaksanaan kebijakan;

- Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota;
- 15. Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada;
- 16. Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
- 17. Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
- 18. Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
- Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota;
- 20. Menyusun kebijakan/peraturan pemerintah sebagai peserta/anggota;
- 21. Menjadi saksi ahli.
- c. Analis Kebijakan Madya, meliputi:
  - 1. Menyusun rencana kerja organisasi sebagai koordinator;
  - Mengumpulkan (mengenali dan mencari) issue-issue kebijakan yang bersifat internasional;
  - 3. Mengumpulkan informasi untuk analisis kebijakan yang akan dilakukan, yang bersifat kompleks (lintas instansi);
  - 4. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan;
  - Menyusun dan menetapkan metodologi untuk melakukan analisis kebijakan (sesuai dengan kebutuhan), yang bersifat kompleks (3 atau lebih metode);
  - Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih untuk menganalisis kebijakan, secara individual;
  - Mengolah hasil data dan informasi yang diperoleh dari penerapan metodologi terpilih untuk menganalisis kebijakan, secara berkelompok sebagai koodinator;
  - 8. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan, secara individual;

- Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan, secara berkelompok sebagai koordinator;
- 10. Menganalisis permasalahan kebijakan;
- 11. Menyusun alternatif kebijakan sebagai solusi masalah kebijakan;
- 12. Melakukan penilaian terhadap alternatif-alternatif kebijakan;
- 13. Menyusun rekomendasi kebijakan sesuai dengan hasil penilaian terhadap alternatif-alternatif kebijakan dalam bentuk memo/telaah kebijakan;
- 14. Menyusun konsep kebijakan (draft) yang bersifat *regelling* (pengaturan);
- 15. Membahas konsep kebijakan sebagai pembahas;
- 16. Merumuskan hasil pembahasan kebijakan;
- 17. Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai pembahas;
- Melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada;
- 19. Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara individual;
- 20. Mengolah dan menilai hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai koordinator;
- 21. Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
- 22. Melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada;
- 23. Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai peserta/anggota;
- 24. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan sebagai peserta/anggota;
- 25. Menyusun kebijakan/peraturan pemerintah sebagai peserta/anggota;
- 26. Menjadi saksi ahli.

- d. Analis Kebijakan Utama, meliputi:
  - 1. Menyusun agenda kegiatan analisis kebijakan;
  - 2. Melakukan penilaian terhadap alternatif-alternatif kebijakan;
  - Menyusun rekomendasi kebijakan sesuai dengan hasil penilaian terhadap alternatif-alternatif kebijakan dalam bentuk naskah akademik;
  - 4. Membahas konsep kebijakan sebagai penyaji;
  - Menyempurnakan kebijakan yang bersifat regelling (pengaturan)
  - Melakukan kegiatan sosialisasi pelaksanaan kebijakan sebagai penyaji;
  - 7. Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara individual;
  - 8. Menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan kebijakan secara berkelompok sebagai koordinator;
  - Melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang ada;
  - Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara individual;
  - 11. Mengolah dan menilai hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan secara berkelompok sebagai koordinator;
  - 12. Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan secara individual;
- Menyusun laporan hasil dan penilaian evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan secara berkelompok sebagai koordinator;
- Menyusun kebijakan/peraturan pemerintah sebagai narasumber;
- 15. Menjadi saksi ahli.
- (2) Analis Kebijakan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Analis Kebijakan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Analis Kebijakan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), maka Analis Kebijakan lain yang berada di atas atau di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 11

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Analis Kebijakan yang melaksanakan tugas Analis Kebijakan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- b. Analis Kebijakan yang melaksanakan tugas Analis Kebijakan dua tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- c. Analis Kebijakan yang melaksanakan tugas Analis Kebijakan di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

- (1) Pada awal tahun, setiap pejabat Analis Kebijakan wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Analis Kebijakan yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai.
- (4) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dapat dilakukan penyesuaian.

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
  - a. unsur utama; dan
  - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari:
  - a. pendidikan;
  - b. analisis kebijakan; dan
  - c. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang terdiri dari :
  - a. pengajar/pelatih di bidang Analis Kebijakan;
  - b. peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang Analis Kebijakan;
  - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
  - d. keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Analis Kebijakan;
  - e. perolehan penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan atau penghargaan lainnya;
  - f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
  - g. perolehan gelar kehormatan akademis.
- (4) Rincian kegiatan Analis Kebijakan dan angka kredit masingmasing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Analis Kebijakan, untuk:
  - Analis Kebijakan dengan pendidikan sekolah Sarjana (S1)/ Diploma IV sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini;
  - b. Analis Kebijakan dengan pendidikan sekolah Magister (S2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini; dan

- c. Analis Kebijakan dengan pendidikan sekolah Doktor (S3) sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan
  - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

- (1) Jabatan fungsional Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi Analis Kebijakan Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 2 (dua) dari unsur pengembangan profesi.
- (2) Analis Kebijakan Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 4 (empat) dari unsur pengembangan profesi.
- (3) Analis Kebijakan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi.
- (4) Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi.
- (5) Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 10 (sepuluh) dari unsur pengembangan profesi.
- (6) Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 12 (dua belas) dari unsur pengembangan profesi.

(7) Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 14 (empat belas) dari unsur pengembangan profesi.

#### Pasal 16

- (1) Analis Kebijakan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (2) Analis Kebijakan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Analis Kebijakan.

#### Pasal 17

Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari tugas pokok.

- (1) Analis Kebijakan yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang Analis Kebijakan, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
  - apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
  - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

#### **BAB VII**

# PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Analis Kebijakan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Setiap Analis Kebijakan mengusulkan secara hirarki Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.
- (3) Analis Kebijakan yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

#### BAB VIII

# PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT

#### Bagian Kesatu

# Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:
  - a. Kepala Lembaga Administrasi Negara bagi Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Lembaga Administrasi Negara dan Instansi lainnya.
  - b. Pimpinan Instansi (eselon II yang membidangi Kebijakan) bagi Analis Kebijakan Pertama, Pangkat Penata Muda tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi masing-masing.
  - c. Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang di tunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.

d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat Eselon II yang ditunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

#### Bagian Kedua

#### Tim Penilai

#### Pasal 21

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dibantu oleh:

- a. Tim Penilai Analis Kebijakan bagi Kepala LAN pada Lembaga Adminitasi Negara yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
- b. Tim Penilai Analis Kebijakan bagi Kementerian/Lembaga yang membidangi Kebijakan pada Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi;
- Tim Penilai Analis Kebijakan Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
- d. Tim Penilai Analis Kebijakan Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon II yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

- (1) Tim Penilai jabatan fungsional Analis Kebijakan terdiri dari unsur teknis yang membidangi Analis Kebijakan, unsur kepegawaian, pejabat fungsional Analis Kebijakan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
  - a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Analis Kebijakan.
- (4) Anggota Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota pada ayat (2) huruf d, paling sedikit 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi/Kabupaten/Kota.

- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analis Kebijakan yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Analis Kebijakan; dan
  - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (7) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari Analis Kebijakan, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Analis Kebijakan.

- (1) Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit Analis Kebijakan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain yang terdekat atau tim penilai Instansi di Lembaga Administrasi Negara.
- (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit Analis Kebijakan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat, Provinsi lain yang terdekat, atau tim penilai Instansi di Lembaga Adminitrasi Negara.
- (3) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
  - Kepala Lembaga Adminitrasi Negara yang membidangi Analis Kebijakan untuk Tim Penilai Pusat;
  - b. Pejabat eselon I yang membidangi Analis Kebijakan di Kementerian/Lembaga untuk Tim Penilai Instansi;
  - c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
  - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota tim penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Tata kerja Tim Penilai jabatan fungsional Analis Kebijakan dan tata cara penilaian angka kredit Analis Kebijakan ditetapkan oleh Kepala Lembaga Admintrasi Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan fungsional Analis Kebijakan.

#### Bagian Ketiga

# Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit

#### Pasal 26

Usul Penetapan angka kredit Analis Kebijakan diajukan oleh:

- a. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada masing-masing instansi, Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Kepala Lembaga Adminitrasi Negara bagi angka kredit Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina Tingkat. I, golongan ruang IV/b sampai dengan Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- b. Pejabat yang membidangi Kepegawaian setingkat eselon III pada Pejabat struktural eselon II yang membidangi Kepegawaian untuk angka kredit Analis Kebijakan Pertama, pangkat penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kementerian/Lembaga masing-masing.
- c. Pejabat yang membidangi kepegawaian setingkat eselon III kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk angka kredit Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
- d. Pejabat yang membidangi kepegawaian setingkat eselon III kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang ditunjuk untuk angka kredit Analis Kebijakan Pertama, Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

#### Pasal 27

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Analis Kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Analis Kebijakan yang bersangkutan.

#### BAB IX

# PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Pasal 28

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Analis Kebijakan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang di angkat untuk pertama kali dalam jabatan Analis Kebijakan harus memenuhi syarat:
  - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV dengan bidang ilmu yang relevan dengan analisis kebijakan dan sesuai dengan kebutuhan instansi;
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
  - c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Analis Kebijakan; dan
  - d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) angka kreditnya ditetapkan 150 (seratus lima puluh).
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada unsur utama terdiri dari pendidikan formal dan tugas pokok.
- (4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Analis Kebijakan yang telah ditetapkan dari Calon Pegawai Negeri Sipil.

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Analis Kebijakan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);

- b. tersedia formasi untuk jabatan Analis Kebijakan;
- c. memiliki pengalaman di bidang analisis kebijakan paling kurang
   2 (dua) tahun; dan
- d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

#### BAB X

# KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

- (1) Analis Kebijakan dapat dinaikan jabatan, apabila memenuhi syarat:
  - a. mencapai angka kredit yang disyaratkan;
  - b. memiliki masa kerja 1 (satu) tahun dalam jabatan;
  - c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. telah lulus uji kompetensi; dan
  - e. masih tersedia formasi.
- (2) Analis Kebijakan dapat dinaikan pangkat, apabila memenuhi syarat :
  - a. mencapai angka kredit yang disyaratkan;
  - b. memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dalam pangkat;
  - c. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - d. syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan.
- (3) Analis Kebijakan yang akan naik jabatan diikuti dengan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan ditetapkan sebelum kenaikan pangkat.

#### BAB XI

#### **KOMPETENSI**

#### Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analis Kebijakan yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, yang bersangkutan harus lulus uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara selaku pimpinan Instansi Pembina.

#### BAB XII

#### DIKLAT

#### Pasal 33

- (1) Analis Kebijakan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi dapat mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Analis Kebijakan.

#### BAB XIII

#### **FORMASI**

#### Pasal 34

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Analis Kebijakan dilaksanakan sesuai formasi jabatan Analis Kebijakan dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Analis Kebijakan dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Analis Kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan tertulis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Analis Kebijakan dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Analis Kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan tembusan disampaikan ke instansi pembina Analis Kebijakan.

- (1) Penetapan formasi Analis Kebijakan didasarkan pada indikator, antara lain :
  - a. ruang lingkup kebijakan;
  - b. jumlah kebijakan yang dihasilkan;
  - c. karakteristik pekerjaan/tugas pokok; dan
  - d. jumlah dan jenis jabatan.
- (2) Formasi Analis Kebijakan di lingkungan Instansi Pusat, setiap lingkungan eselon I sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang sifatnya perumusan kebijakan adalah paling banyak 10 (sepuluh).
- (3) Formasi Analis Kebijakan di Provinsi setiap lingkungan eselon II, paling banyak 6 (enam).
- (4) Formasi Analis Kebijakan di Kabupaten/Kota setiap lingkungan eselon II, paling banyak 5 (lima).
- (5) Penentuan jumlah kebutuhan pegawai (formasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada analisis jabatan dan penghitungan beban kerja.

#### BAB XIV PENURUNAN JABATAN

#### Pasal 36

- (1) Analis Kebijakan yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.
- (3) Penurunan jabatan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **BAB XV**

# PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembebasan Sementara

#### Pasal 37

(1) Analis Kebijakan Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 40 (empat puluh) dari tugas pokok.

- (2) Analis Kebijakan Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Analis Kebijakan Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 80 (delapan puluh) dari tugas pokok.
- (3) Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Analis Kebijakan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 120 (seratus dua puluh) dari tugas pokok.
- (4) Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 160 (seratus enam puluh) dari tugas pokok.
- (5) Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari k tugas pokok.
- (i) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Analis Kebijakan dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:

 $\times$ 

- a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Analis Kebijakan;
- c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

#### Bagian Kedua

#### Pengangkatan Kembali

#### Pasal 38

(1) Analis Kebijakan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan Analis Kebijakan.

- (2) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Analis Kebijakan apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Analis Kebijakan apabila berusia paling tinggi 51 tahun.
- (4) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Analis Kebijakan apabila telah selesai cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Analis Kebijakan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d, harus diangkat kembali ke dalam jabatan Analis Kebijakan setelah habis masa tugas belajarnya.
- (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Analis Kebijakan yang diperoleh selama pembebasan sementara.

#### Bagian Ketiga

#### Pemberhentian dari Jabatan

#### Pasal 39

- (1) Analis Kebijakan diberhentikan dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
- (2) Analis Kebijakan diberhentikan dari jabatannya, apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat dan penurunan jabatan.

#### Pasal 40

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### BAB XVI INPASSING

#### Pasal 41

- (1) PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini masih dan telah menjalankan tugas di bidang kebijakan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat disesuaikan/diinpassing ke dalam jabatan fungsional Analis Kebijakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) PNS yang disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV dengan bidang ilmu yang relevan dengan analisis kebijakan dan sesuai dengan kebutuhan instansi;
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
  - c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - d. memperhatikan beban kerja/kebutuhan formasi; dan
  - e. lulus Uji Kompetensi.
- (3) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan Analis Kebijakan, sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- (4) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/inpassing.
- (5) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi PNS yang disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam melaksanakan penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan.
- (6) Batas waktu inpasing/penyesuaian mulai sejak peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan dan harus sudah selesai pada akhir Desember 2013.

#### BAB XVII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 42

(1) Untuk kepentingan dinas dan/atau peningkatan pengetahuan, pengalaman, dan pengembangan karier, Analis Kebijakan dapat dipindahkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain. (2) Dengan ditetapkannya jabatan fungsional Analis Kebijakan jabatan struktural eselon III dan eselon IV di masing-masing instansi perlu ditinjau kembali.

# BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 43

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 44

Apabila ada perubahan mendasar sehingga ketentuan peraturan ini dianggap tidak sesuai lagi, maka dapat ditinjau kembali.

#### Pasal 45

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2012

MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

WAR ABUBAKAR

LAMPIRAN I: PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR : 5 TAHUN 2012 TANGGAL : 10 Februari 2012

# RINCIAN BUTIR KEGLATAN

# JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DAN ANGKA KREDITNYA

L							
<u>z</u>	NO UNSUR	SUB UNSUR	KEDIATAN				
	4		Military.	KODE	SATUAN HASIL	KREDIT	PELAKSANAAN KEGIATAN
<u> </u>	) Pendidikan	A Pendiditan Formal	1. Pesce Safara				
	_		a Doktor (S3)	,			i
-:			b Maciglar (S2)	-	ljazah	200	Semua Jenjang
-			1 5	2	ljazah	150	Semua Jenjang
_		B Pendidikan, Pelatihan	1	၉	ljazah	100	Semua Jenjang
		Kedinasan Teknis Fungsional	- 1	4	Setiap sertifikat	15	Curinal curran
			2. Lamanya 641-960 jam	10	Setiap sertifikat	ď	Si di
			3. Lamanya 481-640 jam	9	Settap sertifikat	) (d	cernua cenjang
_			4. Lamanya 161-480 Jam		Settler contisted	,	cemua Jenjang
•			5. Lamanya 81-160 Jam	.   100	Sertion control	7)	Semua Jenjang
· · ·			6. Lamanya 31-80 jam		Secretary sectations	2	Semua Jenjang
			7. Lamanya 10-30 jam	»	Settap sertifikat	-	Semua Jenjang
		C Diklat Pra Jabatan	Golongan III	₽	Setiap sertifikat	0,50	Semua Jenjang
				=	Setiap sertifikat	2	AK Pertama
=	Perecanaan	Perencanaan kegiatan	Menymen menters being a second				
			Constitution of the Consti	-			
···-				12	Laporan	0.51	
			b. Peserta/anggota,	5	Laporan	0.30	An Madya
≡	Analisis Kebilakan	A Management		4	Laporan	0.15	AK Description
			. Mengumpulkan (mengenek dan mencari) issue-issue kebijakan yang bersifat :	-			
		_	a. internal (instansional)	+			
			b. Eksternal (regional/wilayah/daemh nashnel de incentional	£	Laporan	0,12	AK Pertama
		•	Regional Assistance Landers and The State Control of the Control o				
			Merican Wildy and California	16	Laporan	41.0	AK Pertama
	·		Buoken	+	Laporan	2 0	AK Muda
			Internasional	18	Laboran	2	
				_		0,19	AK Madya

0,19

Management   Man
2. Mempelous massable untile messable builder messable messabler mes
3. Memoryteus (ann memoryteus) from the memoryteus abunde kompleteur         21 Laporan         0.28           4. Memoryteus (kompleteus) kompleteus makes keelplaten yang akan ditabukan, yang         22 Laporan         0.19           6. Memoryteus (kompleteus) kompleteus makes keelplaten yang akan ditabukan, yang         22 Laporan         0.19           8. Keenplateus (kompleteus (kompleteus makes keelplateus) yang akan ditabukan, yang         22 Laporan         0.20           9. Memoryteus sepanda keepateus makes keelplateus makes keelplateus         23 Proposad         0.20           0. Keenplateus (kompleteus (kompleteus makes keelplateus) (kompleteus keelplateus) (kompleteus keelplateus) (kompleteus (kompleteus) (kompleteu
6. Mercyclaus (excitation)         22 Laporan         0,18           6. Mercyclaus (intia internacial recitations)         22 Laporan         0,18           a. Sofetham (internacial recitations)         22 Laporan         0,18           b. Komplete (intia internacial manifest healplaten)         23 Laporan         0,18           c. Mercyclaus der mendesplan manifest healplaten         23 Laporan         0,18           derigen festivitien (intia internacial manifest healplaten)         23 Laporan         0,18           7. Mercyclaus der mendesplan manifest healplaten         23 Laporan         0,18           8. Mercyclaus der mendesplan manifest healplaten and der permengen metodology         27 Laporan         0,00           8. Mercyclaus has die neutronacial manifest healplaten and der minimation der permengen metodology         23 Laporan         0,00           8. Mercyclaus has die neutronacial male manifest koolplaten and der minimation and der manifest koolplaten, and and manifest koolplaten, and and manifest koolplaten, and and manifest koolplaten, and and manifest koolplaten and der minimation of der minimation and der minimati
6. Mergrampoulkan informasi untuk analisia babjakan yang akan dibecitan, yang         2.2         Laporem         0,18           a. Sederihara (instantional)         2.3         Laporem         0,18           b. Kempulsa (dinta insistena)         2.3         Proposal         0,18           7. Menyusum apanda kegistan matise kebjakan         2.5         Proposal         0,18           7. Menyusum dan mennalopkan matise kebjakan menodologi untuk melakukan analasi kebjakan menodologi untuk melakukan analasi kebjakan secara         2.7         Laporan         0,09           b. Kompheka (3 stau kebin menodo)         2.7         Laporan         0,00         0,00           b. Kompheka (3 stau kebin menodo)         2.7         Laporan         0,00         0,00           b. Kompheka (3 stau kebin menodo)         2.8         Laporan         0,00         0,00           b. Kompheka (3 stau kebin menodo)         2.0         Laporan         0,00         0,00           b. Kompheka (3 stau kebinatar         2.0         Laporan         0,00         0,00           a. Menyusu         3.0         Laporan         0,00         0,00           b. Kondribator         2.0         Laporan         0,00         0,00           b. Kondribator         2.0         Laporan         0,00         0,00
8. Mempatun (Instandonal)         22         Laporen         0,18           8. Mempatun spande (Initae Instandonal)         23         Laporen         0,29           7. Mempatun spande (Initae Instandonal Instandonal Residual
6. Mempusum agenida kegiatan amalise kebijatan.         23         Laporan         0.10           6. Mempusum agenida kegiatan amalise kebijatan.         24         Proposal         0.18           7. Mempusum dam memelupkan matociogu untuk melakukan analasi kebijatan (sessual a. Sederhama (12 mence)         25         Proposal         0.18           8. Mempusum dam memelupkan metociogu untuk melakukan analasi kebijatan (sessual a. Sederhama (12 mence)         27         Laporan         0.40           9. Kompiela (3 atau kabin metocio)         27         Laporan         0.40           10. Kompiela (2 atau kabin metocio)         27         Laporan         0.40           10. Kompiela (3 atau kabin metocio)         28         Laporan         0.50           10. Kelempok sabagai :         30         Laporan         0.50           2. Mempulkan hasil pengelahan data dan hitomasi dalam analasis kebijatan, secara.         33         Laporan         0.55         A.           2. Mempulkan hasil pengelahan tebijatan.         33         Laporan         0.48         A.           2. Mempulkan hasil pengelahan sebagai sotusi masalah kabijatan disatukan oleh:         35         Laporan         0.77         A.           2. Mempulkan hasilahan sebagai sotusi masalah kabijatan disatukan oleh:         39         Laporan         0.77         A.           <
6. Menyssun agenda kapidaan analise tebijakan.         24         Proposal         0.18           7. Menysusun agenda kapidaan analise tebijakan.         26         Proposal         0.27           6. Gragen kabulukan mendokojog untuk melakukan analise kabijakan sesuara.         27         Laporan         0.40           8. Korripiska (3 alau labih melakukan melakukan perangaan meladokojog         27         Laporan         0.40           9. Korripiska (3 alau labih melakukan sebagai :         27         Laporan         0.50           10. Korribiska (3 alau labih melakukan sebagai :         28         Laporan         0.50           2 ketoripok sebagai :         30         Laporan         0.50         0.50           2 ketoripok sebagai :         30         Laporan         0.50         0.50           2 ketoripok sebagai :         30         Laporan         0.50         0.50           3 ketoripok sebagai :         30         Laporan         0.48         A           4 ketoripok sebagai :         4         Laporan         0.48         A           5 Pesarta/ingola         5         Laporan         0.72         A           6 Ketoripok sebagai :         33         Laporan         0.72         A           7 Ketoribadan sebagai solusi mesasah kabijakan ditertukan
24
7- Merryusun dan mendapkan matodology untuk melekukan arabiela kebijakan (sessara dengan kebukuhan), iyang bersatat:   a. Sederikana (1-5 nasode)
Nerrytzun den mendebykan metodologi untuk melekukan anaksis kobijakan (sessua debrigan kebulukan ), yang bensitet:   0.36     a. Sederhana (1-2 metodo)   27   Laporan   0.40     b. Kempeka (3 sitat lebih metode)   28   Laporan   0.50   1.40     b. Kempeka (3 sitat lebih metode)   29   Laporan   0.50   1.40     c. Individu   2   Peserta/Angota   3   Laporan   0.50   1.40     d. Kelompok, sebagal :   3   Laporan   0.48   A.     d. Kelompok, sebagal :   3   Laporan   0.30   A.     d. Merysteun alternatif kebijakan sebagal solusi mesalah kablaikan dilekukan olekt :   38   Laporan   0.30   A.     d. Merysteun alternatif kebijakan sebagal solusi mesalah kablaikan dilekukan olekt :   38   Laporan   0.30   A.     d. Merysteun alternatif kebijakan sebagal solusi mesalah kablaikan dilekukan olekt :   38   Laporan   0.30   A.     d. Merysteun alternatif kebijakan sebagal solusi mesalah kablaikan dilekukan olekt :   38   Laporan   0.30   A.     d. Merysteun alternatif kebijakan sebagal solusi mesalah kablaikan dilekukan olekt :   38   Laporan   0.30   A.     d. Merysteun alternatif kebijakan sebagal solusi mesalah kablaikan dilekukan olekt :   38   Laporan   0.30   A.     d. Merysteun alternatif kebijakan sebagal solusi mesalah kablaikan dilekukan olekt :   38   Laporan   0.30   A.     d. Merysteun alternatif kebijakan sebagal solusi mesalah kablaikan dilekukan olekt :   38   Laporan   0.30   A.     d. Merysteun alternatif kebijakan sebagal solusi mesalah kablaikan dilekukan olekt :   38   Laporan   0.30   A.     d. Merysteun alternatif kebijakan sebagal solusi mesalah kablaikan dilekukan olekt :   38   Laporan   0.30   A.     d. Merysteun dilekukan olekt :   4   4   4   4   4   4   4   4   4
The denythesian data mentalization and an international mutuk melatukan analisis kobijakan (sesual dengan kabbituhan), yang berstett:  a. Sederhausi (1-2 metode)  b. Kompleks (3 siau iebih metode)  a. Individu  b. Ketompok, sebagai:  2) Peserta/Anggota  b. Ketompok, sebagai:  2) Peserta/Anggota  c. Individu  c. Individual order  c.
a. Sederhans (1-2 metode)         27         Laporan         0,40           B. Kompleks (3 atau leakh metode)         28         Laporan         0,60           Rehospotah hasil date dari hidomast yang dipercieh dari penerapan metodologi         29         Laporan         0,50           b. Ketoritustor         30         Laporan         0,50         0,50           2) Peserta/Anggota         31         Laporan         0,50           8. Menyajikan hasil pengolahar data dan informasi dalam analisis kebijakan, secara:         33         Laporan         0,25         A           9. Ketompok, sebagai ;         a. Individu         33         Laporan         0,25         A           1) Koordinator         3         Laporan         0,25         A           2) Peserta/Anggota         33         Laporan         0,48         A           1) Koordinator         35         Laporan         0,24         A           2) Peserta/Anggota         35         Laporan         0,24         A           1. Menyusun alternatif kebijakan sebagai sokual meselah bebijakan dilekuken oleh:         38         Laporan         0,30         A           2. Menyusun alternatif kebijakan sebagai sokual meselah bebijakan dilekuken oleh:         38         Laporan         0,30         A
8. Menganalisk (a) staul robin metodo)         28 Laporan         0,40           8. Menganalisk (metodan informasil yang dipercise) dari penerapan metodologi         29 Laporan         0,90           a. Individu         30 Laporan         0,90           3. Kelompouk, sebagai :         31 Laporan         0,90           3. Menyelikan hasil pengolahan data dan informasil dalam analisis kebijakan, secara:         32 Laporan         0,48           4. Menyelikan hasil pengolahan data dan informasil dalam analisis kebijakan, secara:         33 Laporan         0,48           5. Peserta/Anggola         35 Laporan         0,48           6. Kelompok, sebagai :         35 Laporan         0,48           7. Menyalikan hasil permasalahan kebijakan.         35 Laporan         0,39           7. Menyusun alternatif kebijakan sebagai sotusi mesesiah kebijakan dilekukan oleh:         38 Laporan         0,30           2. Menyusun alternatif kebijakan sebagai sotusi mesesiah kebijakan dilekukan oleh:         38 Laporan         0,30
8. Menyotian hasil date dan informasi yang diperciten dari penerapan metodologi         29         Laporan         0,60           a. Individu         5. Ketompok, sebagai :         30         Laporan         0,90           2. Pesenta/Anggota         31         Laporan         0,50           9. Menyalikan hasil pengotahan data dan informasi dalam analisis kebigikan, secara:         32         Laporan         0,50           9. Ketompok, sebagai :         a. individu         33         Laporan         0,48         A           1) Koordinator         2) Pesenta/Anggota         34         Laporan         0,48         A           2) Pesenta/Anggota         35         Laporan         0,24         A           1) Koordinator         35         Laporan         0,39         A           2) Pesenta/Anggota         35         Laporan         0,34         A           1. Menyusun atematif kebijakan sebagai sotusi mesalah kebijakan dilakukan olehi:         38         Laporan         0,30         A           2. Menyusun atematif kebijakan sebagai sotusi mesalah kebijakan dilakukan olehi:         38         Laporan         0,30         A           39         Laporan         0,30         A         A         Laporan         0,50         A
a. Individu b. Kelompok, sebagai:  a. Individu c. Alenyajkan hasil pengalahan kebjakan sebagai sokusi mesalah kebjakan dilakukan oleh:  39 Laporan 0,90 37 Laporan 0,25 Amenyajkan hasil pengalahan kebjakan.  30 Laporan 0,48 Amenyanalisis permasalahan kebjakan.  31 Laporan 0,48 Amenyanalisis permasalahan kebjakan.  32 Laporan 0,48 Amenyanalisis permasalahan kebjakan.  33 Laporan 0,48 Amenyasun alternatif kebjakan sebagai sokusi mesalah kebjakan dilakukan oleh:  34 Laporan 0,30 Amenyasun alternatif kebjakan sebagai sokusi mesalah kebjakan dilakukan oleh:  35 Laporan 0,30 Amenyasun alternatif kebjakan sebagai sokusi mesalah kebjakan dilakukan oleh:  36 Laporan 0,30 Amenyasun alternatif kebjakan sebagai sokusi mesalah kebjakan dilakukan oleh:  38 Laporan 0,30 Amenyasun alternatif kebjakan sebagai sokusi mesalah kebjakan dilakukan oleh:  38 Laporan 0,30 Amenyasun alternatif kebjakan sebagai sokusi mesalah kebjakan dilakukan oleh:  39 Laporan 0,30 Amenyasun alternatif kebjakan alternatif kebjakan dilakukan oleh:  39 Laporan 0,30 Amenyasun alternatif kebjakan alternatif kebjakan dilakukan dilakukan oleh:  39 Laporan 0,30 Amenyasun alternatif kebjakan alternatif kebjakan dilakukan dilakukan dilakukan oleh:  39 Laporan 0,30 Amenyasun alternatif kebjakan alternatif kebjakan dilakukan dilakukan dilakukan alternatif kebjakan dilakukan d
a. Individua         29         Laporar         0.90           1) Koordinator         30         Laporar         0.90           2) Peseria/Anggota         31         Laporar         0.50           Amenyajikan hasil pengoshan data dan Informasi dalam analisis kebijakan, secara;         32         Laporar         0.25         A           a. Individu         b. Kelompok, sebagai :         33         Laporar         0,48         A           2) Peseria/Anggota         35         Laporar         0,48         A           2) Peseria/Anggota         36         Laporar         0,12         AN           2. Menyusun alternatif kebijakan sebagai soksal massalah kebijakan dilakukan oleh:         36         Laporar         0,30         A           2. Menyusun alternatif kebijakan sebagai soksal massalah kebijakan dilakukan oleh:         36         Laporar         0,30         A           3. Menyusun alternatif kebijakan sebagai soksal massalah kebijakan dilakukan oleh:         36         Laporar         0,30         A
b. Keformpok, sebagai :         1) Koordinator         0.90           2) Peserfa/Angota         31 Laporan         0.90           9. Menyajikan hasil pengolahan data dan Informasi dalam analisis kabijakan, secara:         32 Laporan         0.25         A           1) Koordinator         33 Laporan         0,48         A           1) Koordinator         34 Laporan         0,48         A           2) Peserfa/Angota         35 Laporan         0,24         A           4. Menganalisis permasalahan kebijakan.         35 Laporan         0,12 AA           2. Menyusun alternatif kebijakan sebagai solusi masalah kebijakan dilaktukan oleh:         38 Laporan         0,30 A           2. Menyusun alternatif kebijakan sebagai solusi masalah kebijakan dilaktukan oleh:         39 Laporan         0,30 A
1) Koordinator         30 Laporan         0.90           9. Menyalikan hasil pengolahan data dan Informasi dalam analisis kebijakan, secara;         32 Laporan         0.25           9. Menyalikan hasil pengolahan data dan Informasi dalam analisis kebijakan, secara;         33 Laporan         0.24           1) Kolompok, sebagai;         33 Laporan         0.48           2) Peserta/Anggola         35 Laporan         0.12           4. Menyasun alternatif kebijakan sebagai solusi masalah kebijakan dilahukan oleh:         37 Laporan         0.30           2. Menyusun alternatif kebijakan sebagai solusi masalah kebijakan dilahukan oleh:         39 Laporan         0.30
2) Peserta/Auggota         31 Laporan         0.50           9. Menyajikan hasil pengotahan data dan Informasi dalam analisis kebijakan, secara:         32 Laporan         0,25           a. Individu         33 Laporan         0,48           b. Kelompok, sebagal :         33 Laporan         0,48           1) Koordinator         34 Laporan         0,24           2) Peserta/Anggota         35 Laporan         0,24           1. Menyusun alternatif kebijakan sebagai sokal meselah kebijakan dilakukan oleh:         37 Laporan         0,30           2. Menyusun alternatif kebijakan sebagai sokal meselah kebijakan dilakukan oleh:         38 Laporan         0,30
9. Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi dalam analisis kebijakan, secara: a. Individu b. Kelompok, sebagal: 1) Koordinator 2) Peserta/Angola 2) Peserta/Angola 1. Menganalisis permasalahan kebijakan 1. Menganalisis permasalahan kebijakan sebagai sokusi mesalah kebijakan dilakukan oleh: 34 Laporan 0,24 35 Laporan 0,30 12. Menyusun alternatif kebijakan sebagai sokusi mesalah kebijakan dilakukan oleh: 38 Laporan 0,30
9. Menyelikan hasil pengolahan data dan Informasi dalam analisis kebijakan, secara: a. Individu b. Kelompok, sebagal : 1) Koordinator 2) Peserta/Anggota 2) Peserta/Anggota 1. Menganalisis permazalahan kebijakan. 3. Laporan 3.5 Laporan 3.6 Laporan 3.7 Laporan 3.8 Laporan 3.9 Laporan 3.9 Laporan 3.0 O.30
a. Individu         33         Laporan         0,48           1) Koordinator         34         Laporan         0,48           2) Peserta/Anggota         35         Laporan         0,24           1. Menganalisis permasalahan kebijakan,         36         Laporan         0,12           2. Menyusun alternatif kebijakan sebagai sokusi mesalah kebijakan dilektukan oleh:         37         Laporan         0,30           39         Laporan         0,30
b. Kelompok, sebagai :         33         Laporan         0,48           1) Koordinator         34         Laporan         0,48           2) Peseria/Anggota         35         Laporan         0,24           1. Menganalisis permaselahan kebijakan.         36         Laporan         0,12           2. Menyusun alternatif kebijakan sebagai solusi masalah kebijakan dilektukan oleh:         38         Laporan         0,30           39         Laporan         0,50
1) Koordinator         34 Laporan         0.48           2) Peserfa/Angota         35 Laporan         0.24           1. Menganalisis permasalahan kabijakan.         36 Laporan         0.12           2. Menyusun alternatif kabijakan sebagai sotusi mesalah kabijakan dilektukan oleh:         37 Laporan         0.30           39 Laporan         0,30
1) Noordinator         34         Laporan         0,48           2) Peserfa/Anggota         35         Laporan         0,24           1. Menganalisis permasalahan kabijakan.         36         Laporan         0,12           2. Menyusun alternatif kabijakan sebagai solusi masalah kabijakan dilektukan oleh:         38         Laporan         0,30           39         Laporan         0,50
2) Peserta/Anggota 35 Laporan 0,24  1. Menganalisis permasalahan kebijakan.  2. Menyusun alternatif kebijakan sebagai sokusi masalah kabijakan dilakukan oleh: 38 Laporan 0,30  39 Laporan 0,50
1. Menganalisis permasalahan kabijakan. 2. Menyusun alternatif kabijakan sebagai sokusi mesalah kabijakan <i>dilakukan oleh</i> : 38 Laporan 0.30
1. Menganalisis permasalahan kebijakan.  2. Menyusun alternatif kebijakan sebagai sokusi mesalah kebijakan dilakukan oleh: 38 Laporan 0.30
Menyusun alternatif kebijakan sebagai sokusi mesalah kebijakan <i>ditekukan oleh</i> : 38 Laporan 0,30 39 Laporan 0,50
38 Laporan 0,30
Laporan

Ŀ				ĺ				
2	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA	PELAKSANAAN	11
			the second secon			KREDIT	KEGIATAN	
			And the second s			100		133
			. Melakukan penilaian temadap altematif-altematif kebijakan yang dibuat oleh jenjang		A COLUMN TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE		,	
				₹	Laporan	0.30	AK Madya	
_				4	Laporan	0.60	AV (Home	
·			. Menyusun rekomendasi kebijakan sesual dengan hasil penilalan temadap altematif- altematif kebijakan dalam bentuk :				ON Claim	1
			a memofelaah kebijakan	,		;		
			b naskah akadamir/naskah tahintaa	3	Laporan	09'0	AK Madya	
			1	<b>₹</b>	Laporan	0.80	AK Utama	:
			5. Menyusun konsep kebijakan (draft), yang beraitat :					- 1
			a Beschiking (penetapan)	4	Noekah			
			b Regelling (pengaturan)		Maskelli	8	AK Muda	
		C. Proses penetapan hasil	Merripales konses (a.t.)	45	Naskah	1,80	AK Madya	
_		analisis	₽ .					1
				8	Laboran	090		
			b. Pembahas.	47	in order	8	AK Utama	
			c. Peserta/anggota.			0,24	AK Madya	
				8	Laporan	0,16	AK Muda	
	-		2. Merumuskan basil nembahasan kahilatan	49	Laporan	90'0	AK Pertama	
_			1	95	Laporan	0.45	AV Made	-;-
_			-1				AN Madya	,-
	_		a. Beschiking (penetapan)	74	Minches			7.202
	<u>1,_</u>		b. Regelling (pengaturan)	;	Maskan	0,45	AK Utama	
		D Implementasi / pelaksanaan kebilakan	1. Menusin deef renewal project	3	Naskah	1.00	AK Utama	
	<del>.,</del>		Service to the service to the service of the servic	23	Naskah	20'0	AK Pertama	-
			4. menyaphan banan-banan untuk sosialisasi pelakuanaan kebijakan.	B	Naskah	acc		_
		•1	- /	$\dagger$		8	AK Muda	
_		_,]_	a. Penyaji.	3		1		
			b. Pembahas.	3   1	Laporan	09'0	AK Utama	-
			c. Peserta/anggota,	8	Laporan	0,24	AK Madya	
				27	Laporan	0.20	AK Muda	
_		4_	4. Melektikan pemantauan pelaksanaan kebilakan pang telah disasara	88	Laporan	0,16	AK Pertama	
<del></del> -		,	ststem yang ada, dilakukan oleh:	55 26	Laporan	0,45	AK Madya	
_				8	Laporan	0.30	74	
	-	uri	Manage	61	or or or or	3	AK Muda	
		<u>i                                     </u>	remote an den menial hasil pementauan pelaksanaan kebijakan yang telah	+	Capolan	0,15	AK Pertama	
		<u>.l</u>	a. Individu	<del></del> :,	-	-		
			Production	2	- January			
			D. Kekompok, sebagai :	+	Laporan	1,20	AK Madya	
			1) Koordinator	1				
			2) Peserta/Anggota	3	Laporan	1,20	AK Madya	
				2	Laporan	0,80	AK Muda	
				8	Laboran	0,0	***************************************	

AK Pertama

_								
Q.	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA	PELAKSANAAN	-
	and the second s	,						17-
			8. Menyutun laporan hasti pemantauan, palaksanaan kehilakan senera					Section 1
_			1. Individue					
			The Landson of the La	8	Laporan	1,40	AK Utama	
				_				
	-			29	Laporan	140	AK I Hama	<del></del> -
			2) Peserta/Anggota	88	Laporan	56	AK Madva	
_				8	Laporan	07.0	AK Muda	
		E. Evaluasi kinaria kabilatra		۶	Laporan	58	AK Dedam	•••
			<ul> <li>Melaksanakan evaluasi kinetja pelaksanaan kebijakan yang teleh ditetapkan berdasarkan sistem yang ade, dilakukan oleh;</li> </ul>	۲	Laporan	1,20	AKUlama	<del></del> -
			- [	22	Laporan	0,90	AK Madva	
			<ol> <li>Mergolan dan menilai hasil evaluasi kinerja peleksanaan kebijakan yang telah ditelapkan</li> </ol>					
			a. Individu	2				
			b. Kalompok	,	Laporan	1,60	AK Utama	
			1) Koordinator	,				_
			2) Peserta/Angoota	2	Laporan	1,60	AK Utama	
				72	Laporan	1,20	AK Madya	_
				22	Laporan	0,80	AK Muda	
			3. Menyusun laboran basil dan panitolan sunt.	76	Laporan	0,40	AK Pertama	
			sebagai :					
_			a. Individu	1				
			b. Kelompok	:	Caporan	1,40	AK Utama	
			1) Koordinator					
			2) Peserta/Angpota	0	Laporan	1,40	AK Utama	
				<b>6</b> 2	Laporan	1,05	AK Madya	
				8	Laporan	0,70	AK Muda	
	<u>.</u>	F. Mengikuti pembehasan	Menyusun kebijakan/peraturan pemerintah sahanai	26	aporan	0,35	AK Pertama	
		ain.	a. Narasumber.	-				
		• —	b Peserta/anogota.	82	Laporan	89'0	AK Utama	
_	-	<u> </u>		ន	Laporan	0.24	AK Madya	
		- <b>4</b>		2	Laporan	0,16	AK Muda	
	٥	G. Menjadi saksi ahii	Menjedi saksi ahii	88	Laporan	90'0	AK Pertama	
				88	Laporan	0,40	AK Utama	
				87	Laporan	0,30	AK Madya	
$\dashv$				28	Laporan	0,20	AK Muda	
				639	Laporan	0,10	AK Pertama	
				  -				

_							
	NO UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	KODE	SATUANHASII	ANGKA	PELAKSANAAN
<u>.</u>			the second secon			KREDIT	KEGIATAN
	PENGEMBANGAN	ŀ	The second second sections in the second				
		Abritah	Membuar karya tularkarya ilmiah hasif penelitian, pengkajian, survey dan evastasi di bidang kabijakan yang di publikasikan				
			a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasirwa				
			b Dalam malath imigh	8	Buku	12,5	Semua Jenjang
			2. 81	91	Naskah	9	Semua Jenjang
<u> </u>			wencuat karya tulakaya limlah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evakiasi di bidang kebijakan yang tidak di publikasikan				
			Delam bentuk buku	8	3.00		
_			b Dalam bentuk makalah		DYNO .	£0	Semua Jenjang
<u>-</u> -			3. Nembust know this Course Maint	8	Naskah	4	Semua Jenjang
·							
			a Dalam bentuk buku yang diterbitkan & diedarkan secara hasional	3.	Buku	80	Semua Jeniano
			D Leidin bentuk majalah	8	Naskah	4	Section Control
			Membuat karya tulisikarya limiah berupa tinjauan atau ulasan limiah dengan gagasan sendiri di bidang kebijakan yang ditidak publikasikan				Display of the second
···.			a Dalam bentuk buku	8			
			b Dalam bentuk makalah	B	Buku	_	Semua Jenjang
<u> </u>			Membris	87	Naskah	3,5	Semua Jenjang
			5 media massa media massa	86	Naskah	2	Semua Jeniana
			6 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau utasan timiah di bidang kebijakan pada pertemuan ilmiah	8	4		
_		B Menyusun Standar/	1 Menyusun dan atau menyembumakan atawaka ili kus			C7	Semua Jenjang
		Pedoman	2 Menvirein den einer	<u>5</u>	Naskah	LC)	Semua Jeniang
		C Uji Kompetensi	seringingan pedoman di bidang kebijakan	104	Naskah	2	Semina Janione
			mengakuti Uji Kompetensi/sertifikasi di bidang kebijakan	102	Sertifikat	,	fille(inac assume
		Penerjamahan / penyaduran buku dan bahan lainnya	1 Menerjemahkan/menyadur buku di bidang kebijakan yang di publikasikan :	<del> </del>		+	Semua Jenjang
			a Buku yang diterbitkan atau diedarkan secara naskonal	3			
			b Majalah yang diakui oleh instansi yang haramana	3	Buku	۷	Semua Jenjang
		1-2	2 Menerjemahisar/menyadur di bidana kahisaran	\$	Naskah	3,5	Semua Jenjang
			bentuk :			  - 	
			a Buku	Ę			
			b Makaiah	3	euku	3	Semua Jenjang
				106	Naskah	5.1	Semua Jeniana

-		$\mid$							
<u> </u>	NO UNSUR		SUB UNSUR	KEGIATAN	KODE	SATUAN HASIL	ANGKA	PELAKSANAAN	Į.
				Harmon Marrie was a control familia.			KREDIT	KEGIATAN	
	V PENUNJANG	∢_	:	Mengelar/melath pada pendidikan dan pelaihan labilatan					200
		l	Kebinkan		107	Setiap Jam	90'0	Contract	4
		Φ.	Peran serta dalam seminar/lokakana/	1 Mengikuti seminari kokakarya sebagal :				Suprime Serings	
			konferensi di bidang	a Permasaran					I —
			Kebijakan		108	Setiap Kali	8	Semua Jeniano	-
				o rempanas/moderator/ narasumber	109	Setaip Kali	2	Samuel Incine	
			1_	c Peserta	110	Setiap Kali	-	Birefuse serios	
			+4 <u></u>	2 Mengikuti delegasi limlah sebagal :			-	Semua Jenjang	T. T
			<u>.</u> - 1	a Ketua	1	11 / 10 100		è	
				b Angoda		Seliap Naii	č,	Semua Jenjang	
-		ပ		1. Tingkat Nasional sebanai	112	Setiap Kali	1	Semua Jenjang	
			Kebijakan						77
				a. rengurus akti	113	Tahun	-	Semina in in	
					4=	Tahun	22.0	Sering Jenjarig	
			<u>,1</u>	2. Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kote sebagai :			2	Semua jenjang	
	<del>-</del>			a. Pengurus aktif	 				
			-	b. Anggota aktif	- 12	Tahun	0.50	Semua jenjang	
		<u>_</u>	aan dalam tim		116	Tahun	0,25	Semua jeniang	
		- 1		Menjadi anggota Tim Penilaian jabatan fungsional Analis kebijakan	117	DUPAKIPAK	3		
		<u>п</u>	tanda jasa	Penghargaanfanda jasa Satya Lancana Karya Satya	$\dagger$		5	Semua Jenjang	
				a 30 (tiga puluh) tahun					
			1	b 20 (dua puluh) tahun	118	Tanda Jasa	e e	Semua Jenjang	
			<u></u>	C 10 (secular) (secular)	119	Tanda Jasa	2	Semua Jeniano	
				Market and the second s	120	Tanda Jasa	-	Section Control	
			<u>. 1</u>	memperolen penghargaan lainnya dari pemerintah				fine commo	
		_		e. Tingkat Nasional	3		_		
		<u></u>		b. Tingkat Provinsi		anda Jasa	-	Semua jenjang	
				hormatan akademis	<u>ā</u>	Tanda Jasa	0,50	Semua jenjang	
		L.	an gelar kesarjanaan		<u>ਬ</u>	Tanda Jasa	ħ		
		년 		Memperoleh ljezah lain yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :	+	+	2	Semua Jenjang	
			æ		+		 		
			<u>a</u>	Magister (S2)	124	ljzah/gelar	S	Semua Jenjang	
$\exists$	-		1.		125	(Jzah/gelar			
			ე.	Doktor (S3)	9		,	Semua Jenjang	
					<u>8</u>	ijzah/gelar	15	Semua Jenjang	
								=	

.,			ı	_	
•		KEGIATAN			Semua jenjang
	ANGNA	KREDIT		05.0	OC'O
		SATUAN HASIL		Tabio	
	7007	300	Company of the Compan	128	
	KEGIATAN	The second secon		**************************************	
	SUB UNSUR		G Melaksenakan tugas	laknnya	
1	UNSUR		Trans.		
_	,		Г		7

PENDATAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
CZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN II. PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR : 5 TAHUN 2012 TANGGAL : 10 Februari 2012

UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAWPANGKAT ANALIS KEBIJAKAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (SI)/DIPLOMA JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL

					"" CANADIPLOMA IV	DIPLOMA IV					
- <u>Ž</u>	NO. UNSUR	PERSENTASE							1		
$\perp$			PERTAMA	1	MUDA						
			##	ſ			MADYA				
	ONSOR O'AMA			III/C	PAN	ž			5	UTAMA	
	1						q/A	IV/c	P/AI	100	
	A. Pendidikan									2/2	
	1. Pendidikan sekolah			-							
	2. Dildet		100	5	91	ξ					
	B. Tugas Pokok					3	ş	100	100	100	
I	C. Pengembangan profesi	%08 ×	20	80	160	240					
~	UNSUR PENUNIANO						999	480	900	760	
	Kegiatan yang mendukum palat			1	1					<del></del> -	
-	analis kebijakan	< 20%				-	<del> -</del>				
	JUMLAH	No.		8	\$	8					
			â			3	 06	120	150		
			3	옭	400	1	_	_	3	190	

MENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI MENTER

1050

85

700

550

<u>충</u>

8

8

190

LAMPIRAN III: PERATURAN MENTER!
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR : 5 TAHUN 2012
TANGGAL : 10 Februari 2012

UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANPANGKAT ANALIS KEBIJAKAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2) JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL

	KREDIT			UTAMA	UTAMA	UTAMA IV/d IV/e	LTAMA	UTAMA	ПАМА	LTAMA	UTAMA	Т	LIAMA	LIAMA
	JENJANG JABATAN GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT	CICCOUNT ANALIS KEBIJAKAN	MADYA	IV/b	-		<del>-</del>	150	250	440	-	<u> </u>	80   110	•
ik (SZ)	TAN/ GOLONGA	AND ROSE CONTRACTOR		IV.		<del>-</del>	- 25		200		1-			_
(SZ)	JENJANG JABA	MUDA	,	Days			150		120			9		
			  }				150					0		
		PERTAMA	a/lin				150					•		
	PERSENTASE								%08 ≺			\$ 20%		
	UNSUR		UNSUR UTAMA		A. Pendidikan	1. Pendidikan sekolah	2. Diklat	B. Tugas Pokok	C. Pengembangan profesi	UNSUR PENUNJANG	Keglatan yang mendukung pelaksanaan kenjatan menjarah	JUMLAH		
_	Ŏ.	1	<u>-</u>				<del></del> -		<u>ပ</u>	2 CN				

N PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI MENTER لان

850

700

550

윉

LAMPIRAN IV: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR :5 TAHUN 2012 TANGGAL :10 Februari 2012

JUNILAH ANGKA KREDIT KUNULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANPANGKAT ANALIS KEBIJAKAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

						Γ			T				T			
			UTAMA		<u>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u>				8		089				170	1
	A KREDIT		5	P/2		_		200			520				130	 
	4G DAN ANGK	US KEBIJAKAN		IV/c				200			400	-	+-		100	
	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT	MADY.	ALMON	g Mg				200			087				2	
OR (S3)	IG JABATAN GC		1					307		160	}			4		400
DIDIKAN DOKT	JENJAN	MUDA	P/III				200			. 08				50		800
STATE SENDIDIKAN DOKTOR (S3)		Z	IIVe				200			•					Ę	}
	PERSENTASE								<del>-</del>	≥ 80%			) dec	×20%		
	UNSUR		UNSUR UTAMA	A Pendidikan		1. Pendidikan sekolah	2. Diklat		B. Tugas Pokok	C. Pengembangan profesi	UNSUR PENUNJANG	Kegiatan yang mendukung setatu	kebijakan	JUMLAH		
	Ö		-	_					_		2					
												_				

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA M DAN REFORMASI BIROKRASI MENTER

1050

850

200

550

<del>6</del>

LAMPIRAN V; PERATURAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR : 5 TAHUN 2012 TANGGAL : 10 Februari 2012

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIANNNPASSING JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS KEBIJAKAN

ANGKA KREDIT DA	163 177 186 163 177 188	300         322         345         368         391           300         325         347         370         393           300         327         349         372         363	584 618 652	550         590         624         655         689           624         636         699         692           600         600         600         692	850         895         940         985         1030           850         899         944         989         1034           850         903         948         989         1034           850         903         948         993         1034
IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT Sarjana/DIV	0	Magister (S2) 300   30			Sarjana/DIV Magister (S2) Doktor (S3)
GOLONGAN RUANG IJA		P/III	IV/b		P/AI
ON I		3	2		7

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFARMASI BIROKRASI MENTER

/AZWAR ABUBAKAR